
Earnings Management di Indonesia: Studi Empiris pada Periode Sebelum dan Setelah Terlaksananya Program Tax Amnesty

Raden Arief Wibowo¹⁾ & Gita Paramita Agustin²⁾

Universitas Peradaban

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 2 No. 2
Juni -November 2019
pp: 1-18

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Tax Amnesty,
Earnings Management*

*JEL Classification: M41,
O23, G18, G20, H71*

Abstract

This study aims to examine earnings management practice in the Indonesian companies, before, during, and after the tax amnesty program, and compare it through testing the difference in the absolute value of discretionary accruals before, during, and after the tax amnesty program. To conduct this analysis, this study uses 42 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2018. Data from all company samples are arranged in the form of Discretionary Accruals, Non-Discretionary Accruals, and Absolute Discretionary Accruals. The results indicate that there are earnings management practices before the tax amnesty program, and it is greater during the tax amnesty, and smaller after the tax amnesty. Based on the results of different tests, this study also shows that there are differences in the value of Absolute Discretionary Accruals in the tax amnesty program (AbsPre) and Absolute Discretionary Accruals after the tax amnesty program (AbsPost), so the hypothesis states that there is difference between earnings management before the tax amnesty program and after the tax amnesty program, can be accepted. In addition, the amount of Absolute Discretionary Accruals before the tax amnesty program (AbsPre) which tends to be higher 68.37% or almost 70%, shows that there is a great effort made by the management of the company in order to make the company looks outperformed to the investors

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar bagi terlaksananya pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, penerimaan negara yang berasal dari

Corresponding author:

¹⁾ raden.peradaban@gmail.com

pajak adalah yang terbesar setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak pada tahun 2017 telah menyumbang sebesar 85,6 % dari seluruh penerimaan negara. Namun, penerimaan negara yang berasal dari pajak ini masih dinilai belum maksimal. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak ini, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dari pengampunan pajak itu sendiri adalah untuk 1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; 2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan 3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).

Seiring dengan diundangkannya dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, pengampunan pajak menjadi isu yang menarik dan telah banyak diteliti oleh para peneliti. Beberapa penelitian telah mengkaitkan *tax amnesty* dengan kepatuhan para wajib pajak. Salah satu penelitian mengatakan bahwa adanya *tax amnesty* mampu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (Nuryati & Bayu, 2019; Sari & Nuswantara, 2017; Suyanto, Intansari, & Endahjati, 2016). Hasil ini cukup bertentangan dengan penelitian Jamil (2017) yang mengatakan bahwa program *tax amnesty* masih belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, pelaksanaan program *tax amnesty* tersebut ternyata hanya didominasi oleh wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan penambahan jumlah wajib pajak baru masih belum cukup signifikan (Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih, 2017). Di samping itu, hanya sedikit wajib pajak yang memahami tentang *tax amnesty* (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Kebijakan *tax amnesty* memang selalu menjadi fenomena yang menarik di suatu negara, khususnya di Indonesia. Okabrian & Martani (2019) telah mengungkapkan fakta baru bahwa hanya sekitar 194 (34,7%) perusahaan dari 559 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, berpartisipasi dalam program *tax amnesty* tahun 2016, dan di antara 194 perusahaan tersebut, 46 (23,71%) perusahaan tidak mengungkapkan nilai

bersih dari aset pengampunan pajak mereka. Sedikitnya tingkat partisipasi perusahaan-perusahaan dalam program *tax amnesty* tersebut menjadi perhatian tersendiri oleh para peneliti terutama tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi perusahaan-perusahaan dalam program *tax amnesty*. Perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* tersebut cenderung merupakan perusahaan-perusahaan yang dulunya adalah penghindar pajak yang di dalam laporan keuangannya terindikasi adanya *fraud* (Tota, 2018). Geraldina & Jasmine (2019) juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* cenderung merupakan perusahaan-perusahaan yang melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Penelitian-penelitian tentang manajemen laba memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti (lihat Azeez, Sukoharsono, Roekhudin, & Andayani, 2019; Baig & Khan, 2016; Bortoluzzo, Sheng, & Gomes, 2016; Chia, Lapsley, & Lee, 2007; Cornett, McNutt, & Tehranian, 2009; Dechow, Hutton, Kim, & Sloan, 2012; Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995; Dhaliwal, Gleason, & Mills, 2004; Elnahass, Izzeldin, & Steele, 2018; Geraldina & Jasmine, 2019; Gumanti, 2000; Hasnan, Rahman, & Mahenthiran, 2011; Istianingsih, 2016; Jiraporn, Miller, Yoon, & Kim, 2008; Kassem, 2012; Li, Zheng, & Ma, 2018; Lin, 2011; Mansor, Che-Ahmad, Ahmad-Zaluki, & Osman, 2013; Mostafa & Ibrahim, 2019; Perols & Lougee, 2011; Rahman & Ali, 2006; Setiawati & Na'im, 2000; Suprianto & Setiawan, 2017; Susanto, Pradipta, & Cecilia, 2019; Suyono, 2017; Trisnawati, Mardayaningrum, & Khotimah, 2018; Wibowo, 2016; Yung & Root, 2019), namun menurut sepengetahuan peneliti, masih jarang yang mengkaitkannya dengan program *tax amnesty* dalam bentuk *event study*. Berdasarkan penelusuran artikel-artikel tersebut, kebanyakan para peneliti lebih berfokus pada penyebab dan dampak dari *earnings management* pada periode tertentu, sedangkan isu tentang *tax amnesty* dan *earnings management*, yang membandingkan *earnings management* pada periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty*, sepanjang pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini mengkaji bagaimana manajemen laba yang ada di perusahaan pada periode sebelum adanya *tax amnesty*, selama adanya *tax amnesty*, dan setelah adanya *tax amnesty*, serta membandingkannya melalui pengujian perbedaan nilai absolut akrual diskresioner sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *event study*, dengan *tax amnesty* sebagai dasar peristiwa dan manajemen laba (*earnings management*) sebagai obyek dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen laba yang ada di perusahaan pada periode sebelum adanya *tax amnesty*, selama adanya *tax amnesty*, dan setelah

adanya *tax amnesty*, serta membandingkannya melalui pengujian perbedaan nilai absolut akrual diskresioner sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty*, sedangkan subyek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak pada bidang yang terindikasi lebih sering melakukan perlakuan manajemen laba yaitu perusahaan-perusahaan selain sektor non-keuangan, karena perusahaan yang bergerak di sektor keuangan lebih ketat pengawasannya terhadap laporan keuangannya.

Periode penelitian ini meliputi periode sebelum *tax amnesty* yaitu tahun 2015 (Q1 2015, Q2 2015, Q3 2015, dan Q4 2015), selama *tax amnesty* yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 (Q2 2016, Q3 2016, Q4 2016, dan Q1 2017), dan setelah *tax amnesty* yaitu tahun 2018 (Q1 2018, Q2 2018, Q3 2018, Q4 2018). Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengukuran *earnings management* dengan menggunakan indikator *discretionary accruals* pada periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty*, kemudian hasil pengukuran tersebut dideskripsikan. Tahapan berikutnya adalah menganalisa perbedaan *earnings management* antara periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty* dengan menggunakan statistik deskriptif dan *paired sample t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan *earnings management* antara periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty*. Sementara itu, apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test.

Untuk melakukan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan 42 sampel perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sampel perusahaan tersebut dipilih dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria: 1) perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan interim kuartalan dalam mata uang rupiah dan akhir tahun buku periode 31 Desember, dan 2) perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi. Data dari semua sampel perusahaan tersebut disusun dalam bentuk variabel *earnings management* yang diprosikan oleh *Discretionary Accruals* ($DA_{i,t}$). *Discretionary Accruals* ($DA_{i,t}$) ini dihitung menggunakan *Modified Jones' Model* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung Total Akrual ($TAC_{i,t}$) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TAC_{i,t} = NI_{i,t} - CFO_{i,t}$$

dimana $TAC_{i,t}$ adalah total akrual perusahaan i dalam periode kuartal t , $NI_{i,t}$ adalah laba bersih perusahaan i dalam periode kuartal t , dan $CFO_{i,t}$ adalah arus kas dari aktivitas operasional perusahaan i dalam periode kuartal t .

b. Menghitung nilai dari $\frac{TAC_{i,t}}{A_{i,(t-1)}}$ dimana $TAC_{i,t}$ adalah total akrual perusahaan i dalam periode kuartal t , dan $A_{i,(t-1)}$ adalah total aset perusahaan i dalam periode kuartal $t-1$.

c. Menghitung nilai dari $\frac{1}{A_{i,(t-1)}}$ dimana $A_{i,(t-1)}$ adalah total aset perusahaan i dalam periode kuartal t-1.

d. Menghitung nilai dari $\frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,(t-1)}}$ dimana $\Delta REV_{i,t}$ adalah pendapatan perusahaan i pada periode kuartal t dikurangi dengan pendapatan perusahaan i pada periode kuartal t-1, dan $A_{i,(t-1)}$ adalah total aset perusahaan i dalam periode kuartal t-1.

e. Menghitung nilai dari $\frac{PPE_{i,t}}{A_{i,(t-1)}}$ dimana $PPE_{i,t}$ adalah total aset tetap berwujud perusahaan i pada periode kuartal t, dan $A_{i,(t-1)}$ adalah total aset perusahaan i dalam periode kuartal t-1.

$$\frac{TAC_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{i,(t-1)}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} \right) + \varepsilon_{i,t}$$

untukmendapatkannilai dari koefisien $\beta_1, \beta_2,$ dan β_3 .

g. Setelah diperoleh nilai dari koefisien $\beta_1, \beta_2,$ dan $\beta_3,$ lalu dilanjutkan dengan menghitung estimasi nilai Non Discretionary Accruals ($NDA_{i,t}$), Non Discretionary Accruals perusahaan i dalam

$$NDA_{i,t} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{i,(t-1)}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} - \frac{\Delta REC_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} \right) + \varepsilon_{i,t}$$

dimana $\Delta REC_{i,t}$ adalah piutang perusahaan i pada periode kuartal t dikurangi dengan piutang perusahaan i pada periode kuartal t-1.

h. Setelah diperoleh nilai Non Discretionary Accruals ($NDA_{i,t}$), langkah terakhir yaitu menghitung estimasi nilai Discretionary Accruals ($DA_{i,t}$), Discretionary Accruals perusahaan i dalam periode kuartal t, dengan persamaan berikut ini:

$$DA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{A_{i,(t-1)}} - NDA_{i,t}$$

i. Hasil perhitungan Discretionary Accruals ($DA_{i,t}$) tersebut kemudian diabsolutkan untuk membentuk variabel Absolute Discretionary Accruals ($ADA_{i,t}$) dan selisih nilai (difference) antara $ADA_{i,t}$ sebelum dengan $ADA_{i,t}$ setelah tax amnesty. Nilai selisih ini lalu dilakukan pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test dan Shapiro-Wilk Test.

Hasil perhitungan *Absolute Discretionary Accruals* ($ADA_{i,t}$) tersebut disajikan dalam bentuk $ADA_{i,t}$ sebelum *tax amnesty* (AbsPre), $ADA_{i,t}$ selama *tax amnesty* (AbsDur), $ADA_{i,t}$ setelah *tax amnesty* (AbsPost), dan $ADA_{i,t}$ hasil selisih nilai (*difference*) antara $ADA_{i,t}$ sebelum dan $ADA_{i,t}$ setelah *tax amnesty* (AbsDiff).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, didapatkan data observasi sebanyak 504 data yang terbagi menjadi 168 data pada periode sebelum *tax amnesty*, 168 data pada periode selama *tax amnesty*, dan 168 data pada periode setelah *tax amnesty*. Hasil statistik deskriptif dari keseluruhan sampel berdasarkan nilai *Discretionary Accruals* ($DA_{i,t}$) sebelum *tax amnesty*, $DA_{i,t}$ selama *tax amnesty*, $DA_{i,t}$ setelah *tax amnesty*, $ADA_{i,t}$ sebelum *tax amnesty* (AbsPre), $ADA_{i,t}$ selama *tax amnesty* (AbsDur), $ADA_{i,t}$ setelah *tax amnesty* (AbsPost), dan $ADA_{i,t}$ hasil selisih nilai (*difference*) antara $ADA_{i,t}$ sebelum dan $ADA_{i,t}$ setelah *tax amnesty* (AbsDiff), dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif *Discretionary Accruals* dan *Absolute Discretionary Accruals*

	$DA_{i,t}$ Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	$DA_{i,t}$ Selama <i>Tax Amnesty</i>	$DA_{i,t}$ Setelah <i>Tax Amnesty</i>	AbsPre	AbsDur	AbsPost	AbsDiff
<i>Minimum</i>	-0,00009	-0,78308	-1,22458	0,00009	0,00044	0,00034	-0,96998
<i>Maximum</i>	5,22710	114,73714	0,29219	5,22710	114,73714	1,22458	5,21309
<i>Sum</i>	45,01956	113,69291	-2,58112	45,01975	123,59582	14,24096	30,77879
<i>Mean</i>	0,26797	0,67674	-0,01536	0,26797	0,73569	0,08477	0,18321
<i>Standard Deviation</i>	0,44149	8,85319	0,16481	0,44149	8,84846	0,14202	0,46307
<i>Skewness</i>	9,00963	12,95904	-4,24882	9,00966	12,95974	5,41296	7,95150
<i>Kurtosis</i>	97,17748	167,95753	25,27723	97,17800	167,96961	35,77776	84,74990
N	168	168	168	168	168	168	168

Sumber: (Diolah penulis)

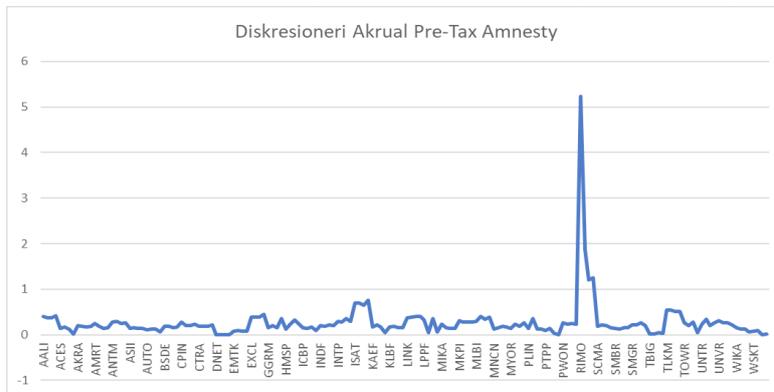
Berdasarkan Tabel 1, nilai *Discretionary Accruals* menunjukkan angka yang cukup bervariasi. *Discretionary Accruals* mencapai nilai tertinggi pada periode selama *tax amnesty* (yaitu sebesar 114,73714), sedangkan nilai terendah terjadi periode setelah *tax amnesty* (yaitu sebesar -1,22458). Di samping itu, nilai rata-rata tertinggi *Discretionary Accruals* juga terjadi pada periode selama *tax amnesty* (yaitu sebesar 0,67674), dan nilai rata-rata terendah *Discretionary Accruals* terjadi pada periode setelah *tax amnesty* (yaitu sebesar -0,01536). Nilai rata-rata ini juga menunjukkan angka yang positif pada periode sebelum *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan praktik *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty*. Kecenderungan ini semakin besar pada periode selama *tax amnesty*, dan semakin kecil pada periode setelah *tax amnesty*. Hasil tersebut juga konsisten dengan hasil statistik deskriptif pada nilai *Absolute Discretionary Accruals*. Berdasarkan Tabel 1, nilai rata-rata tertinggi *Absolute Discretionary Accruals* terjadi pada periode selama *tax amnesty* (yaitu sebesar 0,73569), dan nilai rata-rata terendah *Discretionary Accruals* terjadi pada periode setelah *tax amnesty* (yaitu sebesar 0,08477). Nilai rata-rata ini juga menunjukkan angka yang positif pada

periode sebelum *tax amnesty*. Hal ini semakin kuat menunjukkan bahwa ada kecenderungan praktik *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty*. Kecenderungan ini semakin besar pada periode selama *tax amnesty*, dan semakin kecil pada periode setelah *tax amnesty*.

Hasil dan Pembahasan

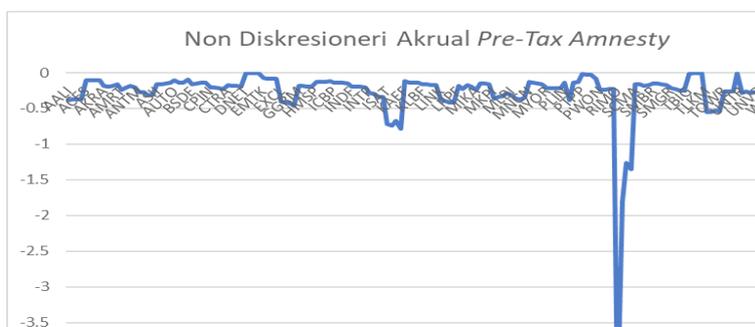
Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Periode Sebelum *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada periode sebelum *tax amnesty*, hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Discretionary Accruals* di atas 0 (nol) atau positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan adanya perilaku *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty* dan perusahaan cenderung untuk meningkatkan laba. Gambar 1 berikut ini menunjukkan *Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty*.



Gambar 1. *Discretionary Accruals* pada Periode Sebelum *Tax Amnesty*

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, pada periode sebelum *tax amnesty*, hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Non Discretionary Accruals* di bawah 0 (nol) atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi yang sesungguhnya, perusahaan mengalami penurunan laba pada periode sebelum *tax amnesty*. Penurunan laba tersebut terjadi bukan berasal dari kebijakan manajemen perusahaan melainkan terjadi karena kondisi faktor eksternal. Gambar 2 berikut ini menunjukkan *Non Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty*.



Gambar 2. *Non Discretionary Accruals* pada Periode Sebelum *Tax Amnesty*

Selain menggunakan grafik, agar hasil penelitian dapat dilihat dengan jelas, penelitian ini menggunakan penghitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada

periode sebelum *tax amnesty*, dan selama *tax amnesty*, dengan menggunakan metode agregatif sederhana. Hasil perhitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* dan selama *tax amnesty* tersebut adalah sebagai berikut:

$$Index = \frac{\sum AbsPre}{\sum AbsDur} \times 100$$

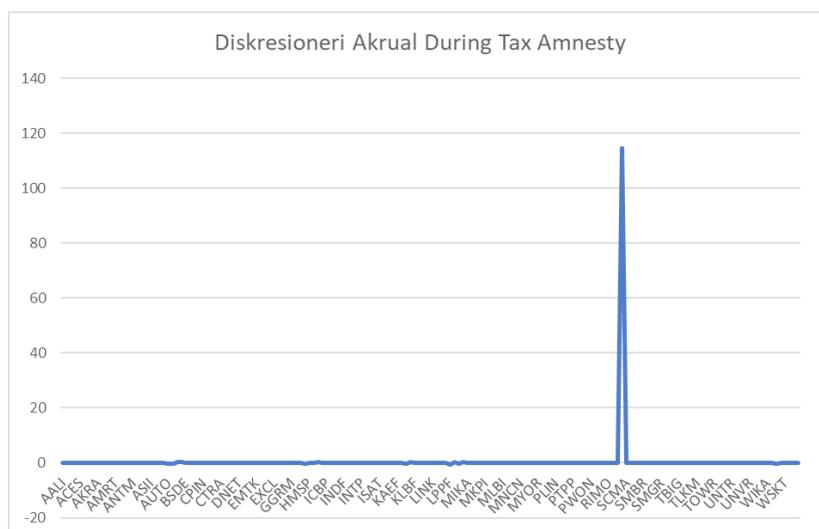
$$Index = \frac{45,02}{123,59} \times 100$$

$$Index = 36,42$$

Berdasarkan hasil perhitungan indeks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) cenderung lebih rendah sebesar 36,42 % jika dibandingkan dengan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur). Dengan kata lain, nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur) cenderung lebih tinggi 63,58 % jika dibandingkan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre). Angka indeks tersebut memperjelas hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba cenderung meningkat pada periode selama *tax amnesty*.

Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Periode Selama *Tax Amnesty*

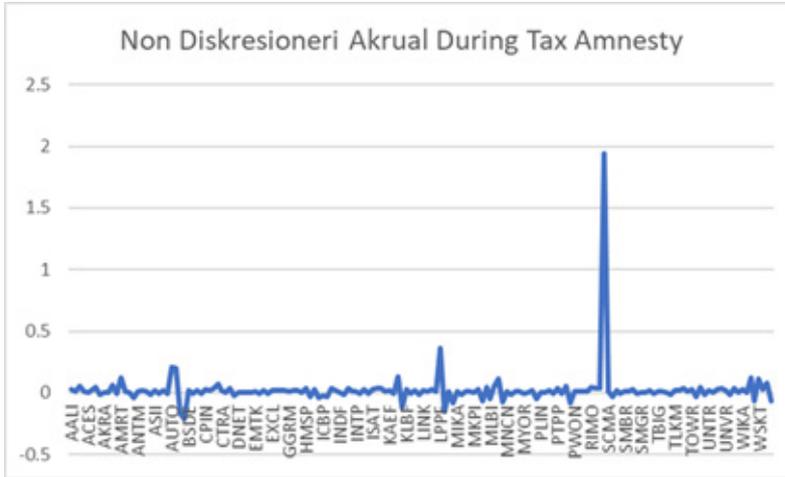
Pada periode selama *tax amnesty*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Discretionary Accruals* hampir mendekati 0 (nol). Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat kecenderungan perilaku *earnings management* pada periode selama *tax amnesty*. Gambar 3 berikut ini menunjukkan *Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty*.



Gambar 3. *Discretionary Accruals* pada Periode Selama *Tax Amnesty*

Selain itu, pada periode selama *tax amnesty*, hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Non Discretionary Accruals* yang berfluktuasi dan cenderung bernilai 0 (nol). Hal

ini menunjukkan bahwa pada kondisi yang sesungguhnya, perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan laba pada periode selama *tax amnesty* yang disebabkan oleh kondisi faktor eksternal dan bukan karena kebijakan manajemen perusahaan. Gambar 4 berikut ini menunjukkan *Non Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty*.



Gambar 4. *Non Discretionary Accruals* pada Periode Selama *Tax Amnesty*

Selain menggunakan grafik, agar hasil penelitian dapat dilihat dengan jelas, penelitian ini menggunakan penghitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty*, dan setelah *tax amnesty*, dengan menggunakan metode agregatif sederhana. Hasil perhitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty* tersebut adalah sebagai berikut:

$$Index = \frac{\sum AbsPost}{\sum AbsDur} \times 100$$

$$Index = \frac{14,24}{123,59} \times 100$$

$$Index = 11,52$$

Berdasarkan hasil perhitungan indeks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) cenderung lebih rendah sebesar 11,52 % jika dibandingkan dengan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur). Dengan kata lain, nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur) cenderung lebih tinggi 88,48 % jika dibandingkan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur). Angka indeks tersebut memperjelas hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba cenderung menurun pada periode setelah *tax amnesty*.

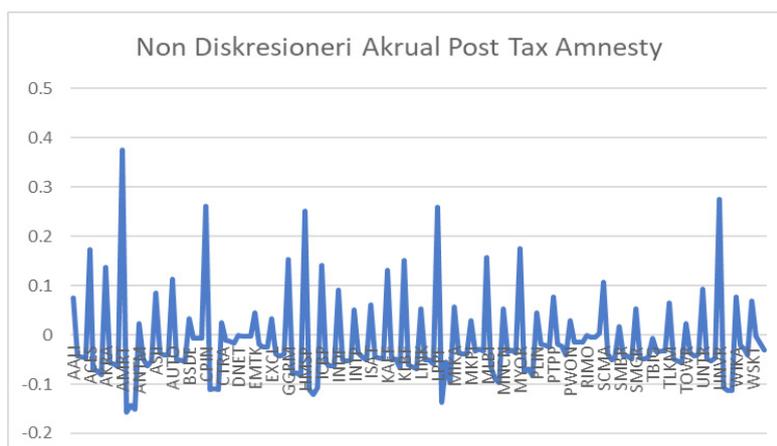
Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Periode Setelah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada periode setelah *tax amnesty*, hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Discretionary Accruals* di bawah 0 (nol) atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perilaku *earnings management* yang menurun pada periode setelah *tax amnesty*, yang berarti bahwa perusahaan cenderung untuk menurunkan laba. Gambar 5 berikut ini menunjukkan *Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty*.



Gambar 5. *Discretionary Accruals* pada Periode Setelah *Tax Amnesty*

Selain itu, pada periode setelah *tax amnesty*, hampir semua perusahaan mempunyai nilai *Non Discretionary Accruals* yang berfluktuasi dan cenderung menuju ke nilai 0,1 (nol koma satu). Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi yang sesungguhnya, perusahaan cenderung mengalami peningkatan laba pada periode setelah *tax amnesty* yang disebabkan oleh kondisi faktor eksternal dan bukan karena kebijakan manajemen perusahaan. Gambar 6 berikut ini menunjukkan *Non Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty*.



Gambar 6. *Non Discretionary Accruals* pada Periode Setelah *Tax Amnesty*

Selain menggunakan grafik, agar hasil penelitian dapat dilihat dengan jelas, penelitian ini menggunakan penghitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty*, dan setelah *tax amnesty*, dengan menggunakan metode agre-

gatif sederhana. Hasil perhitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty* tersebut adalah sebagai berikut:

$$Index = \frac{\sum AbsPost}{\sum AbsDur} \times 100$$

$$Index = \frac{14,24}{123,59} \times 100$$

$$Index = 11,52$$

Berdasarkan hasil perhitungan indeks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) cenderung lebih rendah sebesar 11,52 % jika dibandingkan dengan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur). Dengan kata lain, nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur) cenderung lebih tinggi 88,48 % jika dibandingkan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode selama *tax amnesty* (AbsDur). Angka indeks tersebut memperjelas hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba cenderung menurun pada periode setelah *tax amnesty*.

Perbandingan Antara Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Periode Sebelum *Tax Amnesty* dan Setelah *Tax Amnesty*

Untuk melakukan perbandingan antara *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty*, penelitian ini menggunakan uji beda. Sebelum melakukan uji beda, penelitian ini melakukan uji normalitas data selisih nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost), dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov. Apabila hasil uji normalitas tersebut menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, dan uji beda dapat dilakukan menggunakan *paired sample t-test*. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji beda dapat dilakukan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Tabel 2 berikut ini menunjukkan hasil uji normalitas data.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AbsPre	0,299	168	0,000	0,330	168	0,000
AbsPost	0,276	168	0,000	0,463	168	0,000
AbsDiff	0,266	168	0,000	0,410	168	0,000

Sumber: (Diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah melakukan uji beda dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Tabel 3 berikut ini menunjukkan hasil uji beda antara nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) .

Tabel 3. Hasil Uji Beda dengan Menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
AbsPost - AbsPre	Negative Ranks	146	89,05	13.001,00
	Positive Ranks	22	54,32	1.195,00
	Ties	0		
	Total	168		
Z		-9,349		
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000		

Sumber: (Diolah penulis)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Z sebesar -9,349 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty* dengan setelah *tax amnesty* dapat diterima.

Berdasarkan Tabel 3, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 146 (87%) data observasi *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) berakhir lebih kecil dibandingkan dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 22 (13%) *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) berakhir lebih besar dibandingkan dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre).

Selain menggunakan perhitungan tersebut, penelitian ini juga menggunakan penghitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty*, dan setelah *tax amnesty*, dengan menggunakan metode agregatif sederhana. Hasil perhitungan indeks nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty* tersebut adalah sebagai berikut:

$$Index = \frac{\sum AbsPost}{\sum AbsPre} \times 100$$

$$Index = \frac{14,24}{45,02} \times 100$$

Index = 31,63

Berdasarkan hasil perhitungan indeks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost) berakhir lebih rendah sebesar 31,63 % jika dibandingkan dengan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre). Dengan kata lain, nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) cenderung lebih tinggi 68,37 % jika dibandingkan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost). Angka indeks tersebut memperjelas hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba cenderung menurun pada periode setelah *tax amnesty*. Besarnya nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) yang cenderung lebih tinggi 68,37 % atau hampir mencapai 70 % ini menunjukkan adanya upaya besar pihak manajemen perusahaan agar perusahaan terlihat *outperform* di mata investor.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *event study*, dengan *tax amnesty* sebagai dasar peristiwa dan manajemen laba (*earnings management*) sebagai obyek dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen laba yang ada di perusahaan pada periode sebelum adanya *tax amnesty*, selama adanya *tax amnesty*, dan setelah adanya *tax amnesty*, serta membandingkannya melalui pengujian perbedaan nilai absolut akrual diskresioner sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty*. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang yang terindikasi lebih sering melakukan perlakuan manajemen laba yaitu perusahaan-perusahaan selain sektor non-keuangan, karena perusahaan yang bergerak di sektor keuangan lebih ketat pengawasannya terhadap laporan keuangannya.

Periode penelitian ini meliputi periode sebelum *tax amnesty* yaitu tahun 2015 (Q1 2015, Q2 2015, Q3 2015, dan Q4 2015), selama *tax amnesty* yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 (Q2 2016, Q3 2016, Q4 2016, dan Q1 2017), dan setelah *tax amnesty* yaitu tahun 2018 (Q1 2018, Q2 2018, Q3 2018, Q4 2018). Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengukuran *earnings management* dengan menggunakan indikator *discretionary accruals* pada periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty*, kemudian hasil pengukuran tersebut dideskripsikan. Tahapan berikutnya adalah menganalisa perbedaan *earnings management* antara periode

sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty* dengan menggunakan statistik deskriptif dan *paired sample t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan *earnings management* antara periode sebelum, selama, dan setelah *tax amnesty*. Sementara itu, apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test.

Untuk melakukan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan 42 sampel perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sampel perusahaan tersebut dipilih dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria: 1) perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan interim kuartalan dalam mata uang rupiah dan akhir tahun buku periode 31 Desember, dan 2) perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi. Data dari semua sampel perusahaan tersebut disusun dalam bentuk *Discretionary Accruals*, *Non Discretionary Accruals*, dan *Absolute Discretionary Accruals*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan praktik *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty*. Kecenderungan ini semakin besar pada periode selama *tax amnesty*, dan semakin kecil pada periode setelah *tax amnesty*. Berdasarkan hasil uji beda, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) dengan *Absolute Discretionary Accruals* pada periode setelah *tax amnesty* (AbsPost), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *earnings management* pada periode sebelum *tax amnesty* dengan setelah *tax amnesty* dapat diterima. Di samping itu, besarnya nilai *Absolute Discretionary Accruals* pada periode sebelum *tax amnesty* (AbsPre) yang cenderung lebih tinggi 68,37 % atau hampir mencapai 70 % menunjukkan bahwa terdapat upaya besar yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan agar perusahaan terlihat *outperform* di mata investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Azeez, H. A. R. Al, Sukoharsono, E. G., Roekhudin, R., & Andayani, W. (2019). The impact of board characteristics on earnings management in the international oil and gas corporations. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1–26.
- Baig, M., & Khan, S. A. (2016). Impact of IFRS on earnings management: Comparison of pre-post IFRS era in Pakistan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230(May), 343–350.
- Bortoluzzo, A. B., Sheng, H. H., & Gomes, A. L. P. (2016). Earning management in Brazilian financial institutions. *Revista de Administração*, 51(2), 182–197.

- Chia, Y. M., Lapsley, I., & Lee, H.-W. (2007). Choice of auditors and earnings management during the Asian financial crisis. *Managerial Auditing Journal*, 22(2), 177–196.
- Cornett, M. M., McNutt, J. J., & Tehranian, H. (2009). Corporate governance and earnings management at large U.S. bank holding companies. *Journal of Corporate Finance*, 15(4), 412–430.
- Dechow, P. M., Hutton, A. P., Kim, J. H., & Sloan, R. G. (2012). Detecting earnings management: A new approach. *Journal of Accounting Research*, 50(2), 275–334.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Dhaliwal, D. S., Gleason, C. A., & Mills, L. F. (2004). Last-chance earnings management: Using the tax expense to meet analysts' forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 21(2), 431–459.
- Elnahass, M., Izzeldin, M., & Steele, G. (2018). Capital and earnings management: Evidence from alternative banking business models. *The International Journal of Accounting*, 1–13.
- Geraldina, I., & Jasmine, R. (2019). Tax amnesty and earnings management: An initial evidence. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 26–33.
- Gumanti, T. A. (2000). Earnings management: Suatu telaah pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 104–115.
- Hasnan, S., Rahman, R. A., & Mahenthiran, S. (2011). *Management predisposition, motive, opportunity, and earnings management for fraudulent financial reporting in Malaysia*.
- Istianingsih, I. (2016). Deteksi manajemen laba melalui discretionary revenue dan aktifitas riil: Implikasi penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1125–1142.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51–65.
- Jiraporn, P., Miller, G. A., Yoon, S. S., & Kim, Y. S. (2008). Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective. *International Review of Financial Analysis*, 17(3), 622–634.
- Kassem, R. (2012). Earnings management and financial reporting fraud: Can external auditors spot the difference? *American Journal of Business and Management*, 1(1), 30–33.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Li, B., Zheng, W., & Ma, C. (2018). Do bullet trains affect earnings management? Evidence from China. *Finance Research Letters*, (December).
- Lin, F.-L. (2011). Is earnings management opportunistic or beneficial in Taiwan? Application of panel smooth transition regression model. *International Journal of Economics and Finance*, 3(1), 133–142.
- Mansor, N., Che-Ahmad, A., Ahmad-Zaluki, N. A., & Osman, A. H. (2013). Corporate governance and earnings management: A study on the Malaysian family and non-family owned PLCs. *Procedia Economics and Finance*, 7, 221–229.
- Mostafa, W., & Ibrahim, M. (2019). Firm performance and earnings management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(3), 1–11.
- Nuryati, T., & Bayu, P. (2019). Tax amnesty as a contribution to the improvement of taxpayers' compliance. *Advances in Economics, Business and Mngement Research*, 73, 234–237.
- Okabrian, S., & Martani, D. (2019). Assets and liabilities related to tax amnesty on financial statement of listed companies. *Advances in Economics, Business and Mngement Research*, 89, 288–292.
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada apa setelah tax amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 511–527.
- Perols, J. L., & Lougee, B. A. (2011). The relation between earnings management and financial statement fraud. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 27(1), 39–53.
- Rahman, R. A., & Ali, F. H. M. (2006). Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 21(7), 783–804.
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The influence of tax amnesty benefit perception to taxpayer compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183.
- Setiawati, L., & Na'im, A. (2000). Manajemen laba. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(4), 424–441.
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa wajib pajak mengikuti tax amnesty (Studi kasus di Solo). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(4), 415–433.

- Suprianto, E., & Setiawan, D. (2017). Manajemen laba di Indonesia: Studi sebuah bibliografi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2), 287–301.
- Susanto, Y. K., Pradipta, A., & Cecilia, E. (2019). Earning management: ESOP and corporate governance. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(Special Issue 1), 1–13.
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22.
- Suyono, E. (2017). Berbagai model pengukuran earnings management: Mana yang paling akurat. *Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB Unsoed*, (September), 303–324.
- Tota, I. (2018). The link between tax amnesty and financial statement fraud. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VI(7), 196–202.
- Trisnawati, R., Mardayaningrum, M., & Khotimah, L. (2018). Determinan manajemen laba akruar pada indeks LQ45 dan JII periode 2010-2015. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 141–151.
- Wibowo, A. S. (2016). *Overvaluation, flexibility, dan trade-off dalam praktik manajemen laba korporasi di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Yung, K., & Root, A. (2019). Policy uncertainty and earnings management: International evidence. *Journal of Business Research*, 100(March), 255–267.

